

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa saat ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti, saat ini muncul beberapa desa tematik dengan segala bentuk inovasinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum kepada perubahan pemerintahan desa dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Hal ini bertujuan sebagai upaya pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah social buaya lainnya dapat diminimalisir, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari segala sector dalam upaya mencegah kesenjangan antara kota dan desa.

Sejak masa Orde Baru sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat di daerah, termasuk di Provinsi Papua. Skala pembangunan, program kegiatan, dan jumlah investasinya tidak sedikit bila dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan di Jawa. Sebut saja misalnya dua program yaitu RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) dan PNPM Mandiri, serta investasi Freeport dan MIFEE

(Merauke Integrated Food and Energy Estate). Terkait hal ini, beragam studi terkait pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, dan bermacam program pemberdayaan di provinsi Papua yang dilakukan oleh peneliti maupun akademisi cukup banyak. Di antaranya menyoroti isu-isu seperti inefisiensi, pengelolaan keuangan yang tidak tepat, korupsi, marginalisasi perempuan hingga potensi konflik antar orang asli Papua dan pendatang. Beragam hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa hasil program pembangunan ‘dianggap’ tidak (belum) cukup memberdayakan masyarakat, tetapi malah ‘dituduh’ menjadi biang konflik antara masyarakat atas bantuan yang diberikan. Selain itu berbagai macam program pemberdayaan masih kurang memperhatikan hak-hak warga. Di Papua malah menimbulkan konflik horizontal antara orang ‘asli’ dan pendatang, konflik antara sesama kelompok masyarakat maupun dengan negara.

Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa program-program pembangunan yang telah dijalankan dalam implementasinya belum mampu mengaktifkan relasi sosial-ekonomi antar masyarakat, menjadi lebih terintegrasi, dan membawa perbaikan kesejahteraan bagi warga? Mengapa pembangunan yang berjalan di pedesaan Papua belum mampu mendorong keterlibatan warga masyarakat? Dan juga mengapa program pembangunan pedesaan Papua menjadi pendorong disintegrasi sosial masyarakat dan berkontribusi kepada ketergantungan (*welfare dependency*)?

Kabupaten Nduga merupakan salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua yang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang minim serta, serta masalah keamanan yang sering kali terganggu oleh konflik, menjadi faktor utama yang menghambat proses pembangunan di wilayah ini meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar memulai berbagai program pembangunan, hasil yang dicapai masih belum optimal. Salah satu pendekatan yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberdayakan Kader Pembangunan Desa (KPD) sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Desa Kurigi merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di wilayah Kecamatan Nirkuri Kabupaten Nduga menjadi focus dalam penelitian ini.

Kader Pembangunan Desa (KPD) memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi berbagai program pembangunan di tingkat desa. Mereka diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dapat tersalurkan dengan baik, serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya, peran KPD di kabupaten Nduga khususnya di Desa Kurigi masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Pertama, tingkat Pendidikan dan kapaasitas KPD sering kali belum memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Banyak KPD yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang cukup, sehingga kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang disusun oleh

pemerintah pusat dan daerah. Kedua, keterbatasan akses informasi dan teknologi menjadi kendala besar. Di banyak desa di kabupaten Nduga, akses terhadap informasi terkini sangat terbatas, yang mengakibatkan KPD dan masyarakat desa tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang program pembangunan yang sedang dijalankan.

Ketiga adanya ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Sejarah Panjang konflik dan marginalisasi telah menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam antara masyarakat dan aparat pemerintah. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Keempat, faktor keamanan juga menjadi hambatan signifikan. Konflik bersenjata yang masih sering terjadi di wilayah Nduga menyebabkan banyak program pembangunan terhenti atau berjalan sangat lambat, serta menimbulkan rasa takut dan enggan berpartisipasi di kalangan masyarakat. Selain itu, budaya dan adat istiadat setempat juga memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sistem sosial yang berbasis pada struktur adat sering kali berbenturan dengan mekanisme formal yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan disharmoni dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam tentang dinamika partisipasi KPD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Nduga khususnya di desa Kurigi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi KPD, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran KPD dalam mendorong pembangunan yang

lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi yang efektif dari KPD dan masyarakat tidak hanya akan mempercepat proses pembangunan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Kurigi dan Kabupaten Nduga secara keseluruhan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka terdapat masalah yang hadir dalam proses berjalanya dalam perkembangan berpartisipasi kader pembangunan desa sebagai berikut

1. Bagaimana partisipasi Kader Pembangunan Desa di Desa Kurigi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi KPD dalam pembangunan di Desa Kurigi?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui partisipasi Kader Pembangunan Desa di Desa Kurigi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi KPD dalam pembangunan di desa Kurigi.

1.4 Manfaat penelitian

1. Akademis

Penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi KPD.

3. Kebijakan

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.3 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:2-3).

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal. Menurut Unang Sunardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena samasama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa “Desa

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

(Nurman, 2015: 227)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan istimewa tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Pembangunan desa adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan, bimbingan, dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya yang berdasarkan atas kegotong royongan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang (Adisasmita, 2006: 18-20).

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006: 18-20)

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (*sustainable*).
- b. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelembagaan.
- c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasankawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*) (Adisasmita, 2006)

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasiaktif. Sedangkan menurut Btten, pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan konsep penting dalam teori dan praktik pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Konsep ini tidak hanya menekankan pada kehadiran fisik masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, tetapi juga pada peran aktif mereka dalam mempengaruhi hasil dan manfaat dari pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Rukminto, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (*common goals*), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka (Lawrence, 2000)

Konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang ideal,

partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat yang lebih mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Diana Conyers dalam Suparjan dan Hempr (2003: 53) mengemukakan ada 4 (empat) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Menurut Edi Suharto (2010) dengan melihat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan.

Jenis partisipasi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya, keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, harta dan uang yang dapat digunakan untuk membantu dan membiayai pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Namun, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah untuk mencapai

pembangunan yang baik dengan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan atau program-program pembangunan dengan bekerja sama dengan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

2.2.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Soetomo (2008: 12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat melibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk sarana untuk pembangunan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilnya.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

a. Faktor internal

Slamet (2003: 137-143) mengemukakan bahwa faktor internal adalah factor berasal dari dalam kelompok msyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkat laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor-faktor Eksternal

Dea Deviyanti (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

c) Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Mulyadi (2011: 25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit* dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat.

Chapin dalam Alexande (2002: 43) mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
3. Partisipasi representatif, partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*).
partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan. Adanya reformasi menyebabkan partisipasi dilaksanakan melalui konsultasi publik dan dialog publik pada proses penyusunan Anggaran

2.2.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki berbagai manfaat, di antaranya:

- 1 Peningkatan Efektivitas program pembangunan: program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi local, sehingga lebih efektif dan berkelanjutan.
- 2 Pemberdayaan masyarakat: partisipasi dalam proses pembangunan dapat meningkatkan kapatitas dan kepercayaan diri masyarakat,serta memberikan mereka control lebih besar atas kehidupan mereka sendiri.
- 3 Trannisransi dan akuntabilitas: keterlibatan masyarakat dalam pengambialan keputusan dan pemantauan proyek pembangunan meningkatkan tranisparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi korupsi.
- 4 Pembangunan Sosial: partisipasi masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan Kerjasama di antara warga, serta pembangunan rasa kepemilikan Bersama atas proyek pembangunan.

2.3 Peran Kader Pembangunan Desa (KPD)

Kader pembangunan Desa (KPD) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pembangunan desa KPD berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mendiator antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, peran KPD menjadi krusial untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif pembangunan berjalan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.3.1 Definisi Kader Pembangunan Desa

Menurut Departemen Dalam Negeri (2007), Kader Pembangunan Desa adalah anggota masyarakat yang dipilih dan diberdayakan untuk membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan desa. Mereka adalah relawan yang memiliki dedikasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan pembangunan.

2.3.2 Fungsi dan peran KPD

Fungsi dan peran KPD dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu: **Fasilitator:** KPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam program pembangunan desa. Suharto, E. (2005) membangun masyarakat memberdayakan Rakyat: kajian Strategis pembangunan kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: Refika Aditama.

Motivator: KPD berfungsi untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan Desa. Chambers, R. (1997). *Whose Reality counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technologi Publications.

Mediator: KPD berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul selama proses pembangunan. Mereka membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Cohen, J. M., & Uphoff

N. T. (1980). Participation S Place in **nural development**: seeking clarity through specity. *World Development*, 8(3), 213-235.

Pelaksanaan program: KPD turut serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, impelementasi, hingga evaluasi. Mereka memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Oakley, P & Marsden, D. (1984). *Approaches to participation in Rural Development*. **Geneva**: internasional Labour Office.

Edukator: KPD berperan sebagai endukator yang memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek pembangunan desa, seperti Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*: kajian strategis pembangunan kesejateraan Sosial dan pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

2.3.3 Tantangan yang dihadapi KPD

Meskipun memiliki peran yang penting, KPD sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kerja mereka, antara lain:

Keterbatasan sumberdaya: Banayak KPD yang bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas, baik dalam hal dana, waktu, maupun fasilitas. Hal ini menyulitkan mereka untuk menjalankan peran mereka dengan optimal. Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: intermendiate Technology publications.

Kurangnya pelatihan dan kapatitas: tidak semua KPD memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan yang memandai untuk menjalankan tugas mereka.

Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengelola program pembangunan desa, Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.

Konflik sosial dan politik: KPD sering kali harus bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan konflik sosial dan politik. Konflik ini biasa berasal dari persaingan antar kelompok dalam masyarakat atau dari ketidakcocokan dengan kebijakan pemerintah desa. Oakley, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.

Kurangnya dukungan dari pemerintah: KPD memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk dapat berfungsi secara efektif. Namun, dukungan ini tidak selalu serentendia, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun pengakuan atas peran mereka. Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian Strategis pembangunan kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

2.3.4 Strategis pemberdayaan KPD

Untuk meningkatkan efektivitas peran KPD, beberapa strategi pemberdayaan dapat diterapkan:

Pelatihan dan pendidikan: menyediakan pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan KPD. Refensi: World Bank. (1996) *The World Bank participation Sourcebook*. Washington, D.C.: The World Bank.

Peningkatan Akses Sumber Daya: memastikan bahwa KPD memiliki akses yang memadai terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka
 Refensi: Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology publications.

Dukungan dan Pengakuan: memberikan dukungan dan pengakuan yang lebih besar dari pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta memastikan bahwa peran mereka diakui dan dihargai oleh masyarakat. Oakey, P., & Marsden, D. (1984). *Approaches to participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.

Membangun jaringan dan kemitraan: mendorong KPD untuk membangun jaringan dan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan Lembaga lainnya untuk memperluas dukungan dan sumber daya yang tersedia. Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan kajian strategis pembangunan kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Melalui pemahaman tentang peran KPD dan tantangan yang mereka hadapi, diharapkan upaya-upaya pemberdayaan dapat lebih efektif, sehingga KPD dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Nudga.

2.4 Kerangka Bepikir

Kerangka berpikiran mengenai partisipasi kader pembangunan Desa (KPD) dalam pembangunan daerah di kabupaten Nduga berfokus pada peran penting kader lokal dalam memobilisasi sumberdaya, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan memastikan pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan

berkelanjutan. Bagian ini akan membahas berbagai teori dan konsep yang mendasari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peran KPD, dan relevansinya dalam konteks Kabupaten Nduga.

2.5.1 Konsep partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

1. Definisi dan pentingnya partisipasi: partisipasi masyarakat dalam pembangunan merujuk pada keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Cohen dan Uphoff (1980) mendefinisikan partisipasi sebagai “keterlibatan sukarelah masyarakat dalam pengendalian sumberdaya dan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.” Cohen, J.M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation’s place in Rural Development: seeking Clarity through Specificity*. *World Development*, 8(3), 213-235.
2. Tingkatan partisipasi: Arnstein (1969) menggambarkan berbagai tingkatan partisipasi dalam “Tangga partisipasi”, yang mencakup:
 - 1) manipulasi dan Terapi: partisipasi semua dimana warga tidak memiliki kekuasaan.
 - 2) Informasi dan konsultasi: warga diberi informasi dan diminta pendapat tanpa adanya jaminan bahwa pendapat mereka akan berpengaruh.
 - 3) kemitaraan, Delegasi Kekuasaan, dan control Warga: Warga memiliki pengaruh nyata dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Arnstein, S.R. (1969). *A Ladder of Citizen participation*. *Journal OF the American planning Association*, 35(4), 216-224.
3. Manfaat partisipasi

Partisipasi masyarakat membawa berbagai manfaat, termasuk:

- 1) Meningkatkan kualitas keputusan: keputusan yang diambil berdasarkan masukan dari berbagai pihak lebih mungkin mencerminkan kebutuhan dan preferensi masyarakat
- 2) Pemberdayaan masyarakat: melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
- 3) Keberlanjutan program: program yang didukung dan dimiliki oleh masyarakat lebih mungkin untuk berkelanjutan setelah intervensi awal berakhir.

Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.

2.5.2 Peran Kader Pembangunan Desa (KPD)

1. Definisi dan Fungsi KPD

Kader Pembangunan Desa (KPD) adalah anggota masyarakat yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di tingkat desa. KPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi dan inisiatif lokal. Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology publications.

Tugas dan Tanggung Jawab KPD

- 1) Pengumpulan data dan informasi: Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.

- 2) Perencanaan partisipatif: melibatkan masyarakat dalam merancang program pembangunan
- 3) pelaksanaan program: memfasilitasi implemementasi proyek-proyek pembangunan
- 4) pemantauan dan evaluasi: meniai kemajuan dan dampak dari kegiatan pembangunan.

Bebbington, A. J., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village politics, Culture and Community-Driven Development: Insights from Indonesia. *Progress in Development Studies*, 4(3), 187-205.

2.5.3 Relevansi Partisipasi KPD di kabupaten Nduga

1) Konteks Sosial dan Ekonomi

Kabupaten Nduga menghadapi tantangan yang unik, termasuk topografi yang sulit, infrastruktur terbatas, dan konflik Sosial. Dalam konteks ini, KPD memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak dan mengembangkan solusi yang relevan secara lokal. International Crisis Group. (2018). *Indonesia's papua: A Local perspective on the Conflict*.

2) penggunaan sumber Daya Lokal

KPD dapat memanfaatkan pengetahuan lokal dan jaringan sosial untuk mobilisasi sumber daya yang efektif. Ini termasuk penggunaan lahan, tenaga kerja, dan pengetahuan tradisional untuk mendukung proyek pembangunan.

Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (PP.241-258). Greenwood press.

3) peningkatan partisipasi dan kepemilikan

Partisipasi KPD dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan meningkatkan rasa kepemilikan di antara masyarakat. Kepemilikan lokal ini penting untuk keberlanjutan proyek setelah bantuan eksternal berakhir. Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-Based and -Driven Development: A Critical Review. *World Bank Research Observer*, 19(1), 1-39.

2.5.4 Implementasi dan Evaluasi Partisipasi KPD

1. Pendekatan Partisipatif

Implementasi program pembangunan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan KPD dan masyarakat luas. Metode seperti Focus Group Discussions (FGDS), survei, dan konsultasi publik digunakan untuk mengumpulkan input dari berbagai stakeholder.

Chambers, R. (1994). The Origins and practice of participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969.

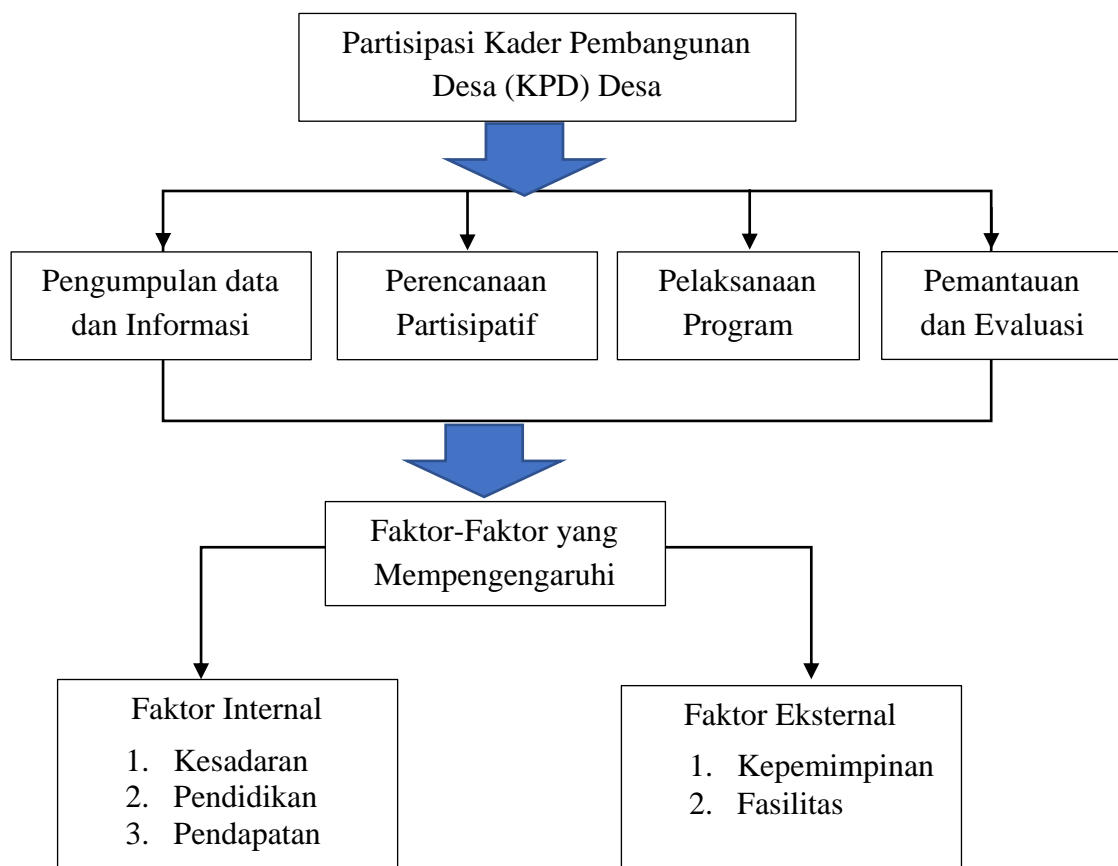
2 pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. KPD terlibat dalam pengumpulan data pelaporan hasil. Estrella, M., & Gaventa, J. (1998). Who Counts Reality? Participatory Monitoring and Evaluation: A Literature Review. IDS Working paper 70 institute of Development studies.

3 Studi Kasus di Kabupaten Nduga

Evaluasi studi kasus di kabupaten Nduga menunjukkan bahwa partisipasi KPD telah meningkatkan efektivitas program pembangunan. Namun, keberhasilan ini

bergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan Lembaga donor, serta kesiapan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Badan pusat Statistik kabupaten Nduga. (2021). Kabupaten Nduga Dalam Angka 2021.



Gambar 2.1 kerangka pikir

Skema kerangka pikir ini menunjukkan bahwa penelitian ini dengan kerangka pikir bahwa, tingkat partisipasi Kader Pembangunan Desa dapat dikaji dari empat bidang partisipasi yaitu bidang yaitu pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi. Keempat

bidang partisipasi Kader Pembangunan Desa ini akan menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi Kader Pembangunan Desa di dalam pembangunan desa Kurigi. Tingkat partisipasi Kader Pembangunan Desa Kurigi ini secara umum akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.